

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR – RI
KE KOTA CIMAH
PROVINSI JAWA BARAT
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022 – 2023
14-18 APRIL 2023**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES

Komisi II DPR RI ingin melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Kerja Komisi II DPR RI yang berada di Jawa Barat khususnya di Kota Cimahi serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari pemerintah daerah ataupun masyarakat yang terkait dengan lingkup tugas Komisi II DPR RI.

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terutama pelaksanaan dan perkembangan realisasi program, perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi dan terkait dengan peran Pemda dalam persiapan Pemilu 2024 terutama dengan adanya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 perihal dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024, apa saja bentuk dukung Pemda Kota Cimahi untuk kebutuhan KPUD Kota Cimahi dan Bawaslu Kota Cimahi dalam persiapan Pemilu 2024
- b. Pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024, antara lain tentang perencanaan program dan besarnya anggaran kebutuhan KPUD Kota Cimahi untuk Pemilu 2024 dan pengawasan terhadap tahapan yang saat ini sedang berlangsung yakni Penyusunan Daftar Pemilih serta pelaksanaan Coklit oleh Pantarlih dan mengenai Pemutakhiran Data Pemilih.
- c. Perencanaan program dan besarnya anggaran kebutuhan Bawaslu Kota Cimahi untuk Pemilu 2024 dan Pengawasan kerja Bawaslu Kota Cimahi terhadap terhadap tahapan Pemilu Serentak 2024 yang sudah dan sedang berjalan saat ini serta pemetaan terhadap Kerawanan Pemilu di Kota Cimahi.
- d. Evaluasi pelaksanaan reforma agraria dan tata ruang wilayah Kota Cimahi, evaluasi pelaksanaan program PTSL dan evaluasi pelaksanaan program pemetaan dan penanganan kasus-kasus pertanahan.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat berjumlah 14 orang anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Saan Mustopa, M.Si beserta anggota tim yang terdiri dari:

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-367	Saan Mustopa, M.Si	Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi II/F- P Nasdem
2.	A-210	Arif Wibowo	Anggota/ F-PDIP
3.	A-165	H. Yadi Srimulyadi	Anggota/ F-PDIP
4.	A-146	M. R. Ihsan Yunus, BA., B,Comm., ME.Con	Anggota/ F-PDIP
5.	A-240	Drs. Cornelis, M.H.	Anggota/ F-PDIP
6.	A-310	Agung Widyantoro, SH, M.Si	Anggota/ F-P Golkar
7.	A-336	H. Hasnuryadi Sulaiman, M.AB.	Anggota/F-P Golkar
8.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si, M.Sc.	Anggota/F-P Gerindra
9.	A-83	Ir. Irwan Ardi Hasman	Anggota/F-P Gerindra

10.	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM	Anggota/ F-P Nasdem
11.	A-005	Sofyan Ali, S.Ag., S.H., M.Pd.	Anggota/ F-PKB
12.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/ F-PKS
13.	A-520	Paulus Ubruangge	Anggota/ F-PAN
14.	A-473	H. lip Miftahul Choiri, S.Pd.I.	Anggota/ F-PPP
SEKRETARIAT			
15.	-----	Dahliya Bahnan	Kasubag Rapat Set. Komisi II
16.	-----	Endang Setia Purnama	Sekretariat Komisi II
17.	-----	Fadhilah Afifah	Sekretariat Komisi II
18.	-----	Hanung Priasmoro	Sekretariat Komisi II
19.	-----	Abrar Amir	Tenaga Ahli Komisi II
20.	-----	Anggia Michel	Tenaga Ahli Komisi II
21.	-----	Bianca Destianti	Medsos
22.	-----	Dindin Mahmudin	Driver

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari media sosial DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan kerja reses dilaksanakan pada tanggal 14-18 April 2023. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Cimahi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Walikota Cimahi

Kota Cimahi dahulu adalah kota administratif ke 2 (dua) yang didirikan oleh pemerintah, namun kenyataannya tidak seperti kota administratif lain yang secara otomatis menjadi kota otonom. Cimahi ingin berubah dari kota administratif menjadi kota otonom sejak tahun 2001. Kota Cimahi memiliki 3 kecamatan dan 15 kelurahan dengan luas wilayah 4.248ha. Sepertiga dari luasan tersebut dikuasai oleh TNI dan Kawasan industry. Wilayah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Cimahi hanya sekitar 2.800 ha. Penduduk Kota Cimahi cukup banyak sebesar 600.000 jiwa. Hal-hal yang menjadi persoalan di Kota Cimahi yaitu kemiskinan, pemukiman, kepadatan penduduk, dan lain-lain akan tetapi Pemerintah Kota Cimahi berupaya mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Secara umum, pelayanan publik di Kota Cimahi berjalan baik dan masyarakat mudah mengakses pelayanan publik. Konsep pengembangan wilayah di kota Cimahi dibatasi oleh banyak peraturan yang membuat Pemerintah Kota Cimahi kesulitan dalam pengelolaannya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat memberikan batasan-batasan tentang pelaksanaan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). hanya 20% saja. Jika Pemerintah Kota Cimahi memiliki lahan 100m² hanya boleh dibangun 20m² saja. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cimahi mencoba membuat konsep

pemukiman yang vertikal tetapi dalam pelaksanaannya terkendala masalah adanya larangan untuk tidak membangun gedung terlalu tinggi karena di Kota Cimahi terdapat landasan udara.

Stasiun Kereta Cepat Indonesia Cina (stasiun KCIC) hanya lewat saja di Kota Cimahi karena stasiun KCIC adanya di padalarang. Dalam kondisi serba terbatas ini, pemanfaatan ruang harus dapat memenuhi kebutuhan Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal. Koordinasi antara Pemerintah Kota Cimahi dengan berbagai *stakeholder* berjalan dengan baik. Kota Cimahi tidak punya sumber daya alam, oleh karena itu tanpa dukungan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa barat, Pemerintah Kota Cimahi tidak dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.

B. Pemaparan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi

KPU Kota Cimahi sudah menjalankan beberapa tahapan pemilu yang sudah lewat, antara lain yaitu:

- 1) Pembentukan anggota badan adhoc
semua hasil seleksi anggota badan adhoc tidak ada masalah dan berjalan lancar. Kota Cimahi memiliki 15 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 45 Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Badan adhoc dan sekretariat KPU Kota Cimahi difasilitasi oleh Pemerintah Kota Cimahi dengan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi staf sekretaris di seluruh wilayah Kota Cimahi.
- 2) Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih berjalan lancar yang dilakukan melalui uji coklit ataupun manual.
- 3) Verifikasi faktual untuk calon anggota DPD telah selesai dilakukan.
- 4) Melakukan penataan dapil. Kota Cimahi memiliki 6 dapil. Dimulai dari utara dapil cimahi 1 alokasinya 7 kursi, dapil cimahi 2 alokasi 6 kursi, dapil cimahi 3 alokasi 10 kursi, dapil cimahi 4 alokasi 9 kursi, cimahi 5 alokasi 7 kursi, cimahi 6 alokasi 6 kursi, semuanya berdasarkan basis kelurahan. Semua dapil ditetapkan berdasarkan pemilu 2019 karena tidak ada penambahan penduduk yang signifikan. Penataan dapil sudah kita sosialisasikan kepada stakeholder dan masyarakat.

KPU Kota Cimahi akan segera mendapatkan bimtek tentang pencalonan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Tahun 2024. Sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Cimahi dibantu oleh Kesbangpol Kota Cimahi. Selain itu, fasilitasi yang diberikan Pemerintah Kota Cimahi yaitu: kantor (pinjam pakai) saat ini sedang dalam proses hibah. Permasalahan yang dihadapi KPU Kota Cimahi antara lain terkait keberadaan gudang logistik karena ruang yang terbatas. Saat ini KPU Kota Cimahi sedang menunggu proses lelang untuk pengadaan gudang logistik. KPU Kota Cimahi menginginkan gudang bulog Kota Cimahi dapat menjadi gudang penyimpanan logistik karena saat ini dirasa hanya tempat itu yang representatif dan memenuhi syarat untuk menyimpan logistik pemilu. Hal ini penting dijadikan perhatian karena sekitar bulan November 2023 logistik pemilu 2024 akan datang. Terkait ketersediaan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pemilu 2024. KPU Kota Cimahi terdiri dari 13 orang ASN dan 12 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), meskipun dengan berbagai keterbatasan KPU Kota Cimahi komitmen untuk bisa menyelenggarakan pemilu 2024.

Beberapa hal lainnya yang menjadi catatan berdasarkan jawaban KPU Kota Cimahi atas pertanyaan Komisi II DPR RI yaitu:

- 1) Pada tahapan rekrutmen dan penilaian seleksi badan ad hoc pemilu 2024 Terdapat kendala teknis pada aplikasi pendaftaran (SIKBA) yang menyebabkan pendaftar menyatakan kesulitan untuk mengunggah dokumen persyaratan.
- 2) DP4 yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri, pemilih Kota Cimahi berjumlah 419.371 orang pemilih. Daftar Pemilih Tetap pemilu tahun 2019 adalah sebesar 380.292 Dan tahun 2024 hasil DPS ada kenaikan dan data pemilih sementara saat ini sebesar 419.915 kenaikan sebesar 39.623 pemilih.

Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)									Ubah Data	Disabilitas
Meninggal	Ganda	Dibawah umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Salah Penempatan TPS	Total		
5,047	338	39	0	0	147	90	12,226	17,887	11,693	2,006

Pemilih baru

PEMILIH BARU		
BARU MURNI	SALAH KARENA PENEMPATAN TPS/ PEMILIH TIDAK ADA DALAM DP4	TOTAL
6,205	12,226	18,431

- 3) KPU Kota Cimahi dalam rangka mempersiapkan tahapan Pencalonan terus berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat, stake holder terkait serta mempelajari rancangan PKPU tentang Pencalonan. SDM Silon untuk sementara masih kekurangan sehingga memberdayakan SDM yang ada seperti PPNPN.
- 4) Verifikasi faktual perseorangan bakal calon anggota DPD di Kota Cimahi berjalan dengan lancar dan tidak ada gugatan dalam tahapan verifikasi faktual bakal calon anggota DPD. Berikut rincian verivikasi faktual bakal calon anggota DPD di Kota Cimahi:

Verifikasi faktual pertama

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Sampel	MS	TMS
1	A IRWAN BOLA	142	86	56
2	A TAUPIK HIDAYAT	140	56	84
3	ABAS ABDUL JALIL	2	0	2
4	ACENG FIKRI	7	2	5

5	ADE KADARISMAN	2	2	0
6	ADIL MAKMUR SANTOSA	1	0	1
7	AGITA NURFIANTI	2	2	0
8	AJI SAPTAJI	16	5	11
9	ALFIANSYAH	244	52	192
10	AMANG SYAFRUDIN	97	92	5
11	AMBU USDEK KANIAWANTI	104	21	83
12	ANDRI PERKASA KANTAPRAWIRA	70	14	56
13	APAN ABDUL GONI	8	7	1
14	ARIF RAHMAN HIDAYAT	68	20	48
15	ATHOILLAH MURSJID, M.SI	45	13	32
16	BIBEN FIKRIANA	196	43	153
17	BUDIYANTO	31	7	24
18	BUDIYONO	4	1	3
19	DEDE AMAR	86	61	25
20	DEDI RUDIANSYAH	16	1	15
21	DENDA ALAMSYAH	133	95	38
22	DENI RUSYNIADI	2	1	1
23	DIAN RAHADIAN	30	4	26
24	DJUMONO	52	24	28
25	EDI KUSDIANA	40	17	23
26	ELAN HERYANTO	300	75	225
27	ENGKOS KOSASIH	46	2	44
28	ENI SUMARNI	262	135	127
29	ERNAWATY TAMPUBOLON	6	2	4
30	HENDRIK KURNIAWAN	3	1	2
31	IMAM SOLAHUDIN	4	4	0
32	IMAM SUGIARTO	4	3	1
33	JAHENOS SARAGIH	31	13	18
34	MUHAMAD DAWAM	166	155	11
35	MUHAMMAD MURTADLOILLAH	4	1	3
36	MUHAMMAD YAMIN	125	46	79
37	MULYADI ELHAN ZAKARIA	144	0	144
38	OGI SOS	4	1	3
39	RIFKI KARTINI	6	4	2
40	ROBBY MAULANA ZULKARNAEN	1	1	0
41	ROHMAN	1	0	1
42	SITTI HIKMAWATTY	135	61	74
43	SONNY HERSONA GW	2	1	1
44	SURATTO SISWODIHARDJO	243	206	37
45	SUROYO	107	15	92
46	SURYANA	1	0	1
47	TEDY GIANTARA	6	4	2
48	WAWAN	48	28	20
49	WAWAN DEDE AMUNG SUTARYA	44	44	0
Jumlah		3231	1428	1803

Verifikasi faktual kedua

No	Nama Bacalon	Jumlah Dukungan	MS	TMS
1	AMANG SYAFRUDIN	7	7	0
2	DENDA ALAMSYAH	1	1	0
3	EDI KUSDIANA	2	2	0
4	ERNAWATY TAMPUBOLON	24	21	3
5	HENDRIK KURNIAWAN	1	1	0
6	IMAM SOLAHUDIN	2	2	0

7	JAHENOS SARAGIH	2	2	0
8	MUHAMAD DAWAM	44	44	0
9	RIFKI KARTINI	5	5	0
10	SAEPUDIN	3	3	0
11	SITTI HIKMAWATTY	52	25	27
		143	113	30

- 5) KPU Kota Cimahi telah melaksanakan sosialisasi ke berbagai segmen. Diawali dengan sosialisasi ke *stake holder* seperti Forkopimda, Pemerintah Kota, Bawaslu dan Partai Politik. KPU Kota Cimahi juga sudah melaksanakan sosialisasi dengan target segmen Pemilih Pemula. Untuk ke depannya, KPU Kota Cimahi juga akan menargetkan sosialisasi dengan segmen pemilih perempuan, pemilih terpinggirkan seperti di Panti Werdha, pemilih disabilitas dan komunitas sebagai usaha meningkatkan partisipasi pemilih.
- 6) KPU Kota Cimahi selalu berkoordinasi dengan *stake holder* terkait pada setiap tahapan kegiatannya baik dalam bentuk audiensi, rapat maupun bentuk kegiatan lainnya sesuai tahapan. Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, KPU Kota Cimahi telah membentuk WA Group, yaitu Bakohumas KPU Kota Cimahi, Datlih KPU Kota Cimahi, LO Parpol Kota Cimahi, LO DPD Kota Cimahi dan WA Group Pimpinan Parpol Kota Cimahi.

C. Pemaparan Ketua Bawaslu Kota Cimahi

- 1) Bawaslu Kota Cimahi saat ini belum menjadi Satker sehingga perencanaan program dan besarnya anggaran masih menginduk kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk yang tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 Bawaslu Kota Cimahi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan mengacu kepada kerangka anggaran yang dikeluarkan oleh surat keputusan Bawaslu RI dan berdasarkan hasil koordinasi antara Bawaslu Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, bahwasannya Bawaslu Kota Cimahi mengusulkan anggaran sejumlah Rp. 14.000.000.000 (Empat Belas Milyar Rupiah) pada tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.
- 2) Pengawas adhoc sudah terbentuk sebagaimana mestinya, berjalan lancar dan tidak ada masalah. Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan dimulai dengan sosialisasi yang dimulai pada tanggal 15 September 2022. Jumlah pendaftar yang mendaftar adalah 73 orang yang terdiri dari 51 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Panwascam yang terpilih berjumlah 9 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Sedangkan dalam proses pembentukan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) di Kota Cimahi dari mulai tahapan pendaftaran sampai dengan PKD terpilih prosesnya dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam). Dari tahap awal sampai terpilih serta pelantikan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) tidak ada yang melakukan gugatan.
- 3) Pelaksanaan penataan dapil tidak ada perubahan masih sama dengan tahun 2019.
- 4) Dalam penpenyandingan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)/proses coklit, ada beberapa rekomendasi yang Bawaslu Kota Cimahi sampaikan kepada KPU Kota Cimahi yang harus ditindaklanjuti. Dalam setiap tahapan pemilu yang sedang berjalan, Bawaslu Kota Cimahi Pada minggu pertama Bawaslu Kota Cimahi melakukan pengawasan melekat, minggu berikutnya dilakukan *sampling*.

- 5) Jajaran sekretariat Bawaslu Kota Cimahi ada 9 orang terdiri dari 2 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 PPNPN. Bawaslu Kota Cimahi mengusulkan ke Pemerintah Kota Cimahi untuk penambahan sumber Daya Manusia (SDM). Permasalahan kepegawaian PPNPNS, secara umum kontrak kerja berakhir massal pada November 2023. Sampai saat ini secara hierarkis belum terdapat informasi mengenai jumlah, kualifikasi dan status untuk mengganti PPNPNS yang berakhir kontraknya, apakah berstatus PPPK dan/atau PNS organik.
- 6) Proses pengawasan tahapan pemilu 2024 secara umum tidak ada masalah. Namun ada sedikit catatan pada proses cokolit yang lalu. Bawaslu Kota Cimahi sangat terbatas mendapatkan akses DP4. Penyebandingan data terakhir Bawaslu tidak diberikan akses untuk melakukan pengawasan.
- 7) Dukungan Pemerintah Kota Cimahi berupa: fasilitasi sewa kantor dan mobil dinas.

Beberapa hal lainnya yang menjadi catatan berdasarkan jawaban Bawaslu Kota Cimahi atas pertanyaan Komisi II DPR RI yaitu:

- 2) Jika merujuk pada pleno DPHP KPU Kota Cimahi, maka dibutuhkan 1560 personil pengawas TPS. Kemudian jika merujuk RLS Kota Cimahi di tahun 2022 di angka 11,21 hal ini menandakan rata-rata orang Cimahi berhenti bersekolah di kelas 2 SMA. Sedangkan untuk PTPS mensyaratkan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, hal ini ke depan akan berdampak dalam proses perekrutan PTPS di Kota Cimahi yang kewenangannya ada pada Panwaslucam. Kaitannya pada Pasal 117 ayat (3) yakni dalam kondisi tidak terdapat PTPS dengan usia 25 tahun dapat diisi dengan yang berusia 17 tahun dengan persetujuan Bawaslu kabupaten/kota, perlu kiranya dikaji mendalam mengenai potensi masalah jika merekrut PTPS yang berusia 17 tahun, yakni dari sisi kematangan kognisi dan kematangan emosi, serta kematangan dalam berkomunikasi. PTPS memiliki peran yang sentral pada saat hari pemungutan suara, di mana PTPS menjadi sumber rujukan bagi KPPS, saksi parpol dan masyarakat mengenai regulasi saat tahapan penghitungan. Kesetabilan emosi dan kesehatan prima PTPS sangat dibutuhkan dalam menangani potensi konflik di TPS.
- 3) Pada tahapan pendaftaran, Verifikasi dan Pentetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sedangkan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD system informasi yang digunakan oleh KPU adalah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cimahi yaitu:
 - a) Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam melakukan pengawasan tidak langsung melalui SIPOL Bawaslu tidak bisa maksimal melakukan pengawasan karena system ini selalu terkendala terkait Server artinya ketika Bawaslu Kota Cimahi mengoperasikan untuk melakukan pengawasan pergerakan data yang masuk atau data yang sudah ada di input dalam SIPOL oleh setiap partai politik calon peserta pemilu 2024 terjadi problem sehingga Bawaslu Kota Cimahi tidak dapat memaksimalkan pengawasan. Terlebih data seperti foto KTP Pengurus dan Keanggotaan Partai Politik Bawaslu Kota Cimahi tidak bisa melihat karena data sudah tidak muncul di akun SIPOL. Sehingga proses pengawasan untuk melakukan pencocokan terkait

data kepengurusan partai dan keanggotaan partai politik tidak dapat maksimal memperoleh data potensi ganda, data ganda internal maupun data eksternal sedangkan dalam alat kerja pengawasan secara hierarkis Bawaslu Kab/Kota harus senantiasa memberikan laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

b) Sistem Informasi Pencalonan (SILON) DPD

Pada tahap awal pendaftaran dan penyerahan dukungan minimal Bakal Calon Anggota DPD Jawa Barat. Server akun SILON DPD terjadi problem server mungkin karena saking banyaknya orang mengakses atau karena memang akun silon ini belum bisa bekerja secara baik.

c) Sistem Informasi PPID Bawaslu Kota Cimahi

Dalam melakukan pelayanan informasi publik Bawaslu Kota Cimahi tidak dapat maksimal karena akun PPID dan Website Bawaslu Kota Cimahi tidak dapat diakses saat itu terjadi masalah yang belum ditemukan solusinya. Sehingga beberapa waktu akun PPID dan Website tidak teroperasikan dengan baik padahal untuk bisa mengembangkan dan melakukan indentifikasi penerimaan permohonan informasi public selain manual juga melalui online sehingga saat itu dikhawatirkan ada informasi yang masuk namun tidak bisa terdeteksi. Namun saat ini sudah dapat dioperasikan Kembali sehingga pelayanan informasi publik Bawaslu Kota Cimahi melalui layanan PPID baik *online* maupun *offline*.

D. Pemaparan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi

Kantor Pertanahan Kota Cimahi memiliki SDM yang cukup banyak untuk melaksanakan tugas sdan fungsinya serta menangani berbagai persoalan pertanahan. Dari luas Kota Cimahi yang hanya sekitar hanya 4200 ha dalam hal penataan tanah, jumlah estimasi bidang Kota Cimahi sekitar 120.000-128.000 bidang tanah, sedangkan jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar 110.000 bidang tanah.

Pemotretan tanah sudah Kantor Pertanahan Kota Cimahi selesaikan 100% dan sedang tahap pengolahan data dalam rangka pembuatan peta dasar pertanahan. Pembuatan peta dasar pertanahan dibantu oleh Pemerintah Kota Cimahi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ITB.

Kerjasama Kantor Pertanahan Kota Cimahi dengan Pemerintah Kota Cimahi berjalan dengan baik ditandai dengan turut aktif dalam pembuatan peta dasar pertanahan agar menjadi daya dukung dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cimahi.

Kasus pertanahan di Kota Cimahi tidak terlalu banyak, akan tetapi tetap ada sengketa dan kasus pertanahan yang menjadi perhatian dan belu dapat terselesaikan, salah satunya yaitu: kasus tanah di sekitar Bandara Husein Sastranegara. Terdapat lahan yang masuk dalam asset TNI sekitar 200 bidang tanah yang di klaim oleh masyarakat. Kasus pertanahan di Kota Cimahi diberikan mendapat surat dari TNI berupa himbuan untuk tidak boleh melakukan aktivitas administrasi pertanahan di lahan tersebut. Sementara batas-batas lahan TNI itu tidak jelas. Para penduduk yang tinggal di lahan tersebut tidak dapat mengurus administrasi pertanahan dan mendapat sertifikat tanah.

Beberapa hal lainnya yang menjadi catatan berdasarkan jawaban Kantor Pertanahan Kota Cimahi atas pertanyaan Komisi II DPR RI yaitu:

1) Hasil evaluasi reforma agraria dan PTSL di Kota Cimahi



Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria antara lain: 1) Dalam kegiatan PTM belum ditetapkan lokasi terlebih dahulu sehingga dalam tahap penetapan lokasi memakan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan survey awal terlebih dahulu untuk mencari potensinya 2) Partisipasi dari kelurahan setempat untuk mendukung kegiatan reforma agraria perlu ditingkatkan 3) Selama pelaksanaan *survey Field Staff* terkendala dalam pengisian kuisioner, karena dalam kegiatan *survey Field Staff* harus mengikuti jadwal responden yang dimana terkadang responden dapat ditemui Ketika malam hari (diluar jam kerja) 4) Perlu dilakukan penyamaan persepsi terkait program reforma agraria dengan dinas terkait untuk kesinambungan kegiatan lanjutan.

No.	Program	2022			2023
		Target	Realisasi	%	Target
1.	PTSL	5.224	5.211	99.75	1.000
2.	Redistribusi	-	-	-	-
3.	BMN	7	7	100	6
4.	IP4T	-	-	-	-
5.	Lintor	26	26	100	16

- 2) Upaya digitalisasi dilakukan dengan scan dan upload produk PTSL yang terintegrasi dengan aplikasi komputerisasi pertanahan. untuk produk tahun 2022 terealisasi sebesar 100%. Dan untuk fisik berkas telah dilakukan pengarsipan dan disimpan di ruang arsip Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Langkah yang dilakukan untuk keamanan warkah yaitu dengan: 1) Pembatasan akses ke ruang arsip 2) Penyimpanan dalam lemari besi 3) Penataan berkas dan produk dengan aplikasi SIMARTACI.
- 3) Kendala dalam pemberian KKPR kepada pelaku usaha di Kota Cimahi yaitu kendalanya dalam mengakses system untuk melihat detail permohonan dan persyaratan, status berkas, koordinasi yang perlu ditingkatkan dengan OPD terkait dalam proses berjalannya berkas mulai permohonan sampai penerbitan PKKPR, banyaknya permohonan Perizinan Bangunan Gedung /IMB yang menggunakan pertek sebagai salah satu persyaratan cukup terhambat karena kurangnya SDM dan sarana dan prasarana.

- 4) Jumlah kasus tanah yang berjalan pada Kantor Pertanahan Kota Cimahi sampai dengan saat ini yaitu Sengketa 2 kasus dan Perkara berjumlah 23 kasus. Hambatannya antara lain: 1) Perlunya peningkatan kapasitas SDM khususnya di seksi PPS untuk dapat menunjang penyelesaian kasus-kasus yang ada 2) Memerlukan tambahan dukungan fasilitas dalam hal ini kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan dinas.

III. CATATAN RAPAT

1. Dengan kondisi luas wilayah, pembangunan, dan penataan ruang yang serba terbatas Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah Kota Cimahi melakukan optimalisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi tata ruang wilayah Kota Cimahi.
2. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Kota Cimahi untuk segera memenuhi kebutuhan pegawai Bawaslu Kota Cimahi agar persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dapat berjalan lancar.
3. Komisi II DPR RI mendukung KPU Kota Cimahi menjadikan Gudang Bulog Kota Cimahi sebagai upaya menyediakan tempat penyimpanan logistik pemilu 2024 yang representatif, luas, dan aman.
4. Dalam rangka memastikan kesiapan pemilu serentak tahun 2024, Komisi II DPR RI meminta KPU Kota Cimahi meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Bawaslu Kota Cimahi terutama terkait kemudahan akses dalam melakukan pengawasan pada seluruh tahapan pemilu.
5. Terhadap kasus pertanahan antara lahan TNI dengan masyarakat yang ada di sekitar lapangan udara, Komisi II DPR RI akan menindaklanjuti kasus pertanahan tersebut dalam rapat kerja dan menyampaikannya ke Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN).

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14-18 April 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, April 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

Saan Mustopa, M.Si